PROVINSI RIAU

RENCANA KERJA TAHUNAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI RIAU
2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Kondisi Umum 1

B. Landasan Hukum 8

BAB II RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN **9**

BAB III PENUTUP **13**

Lampiran 1 Matrik Rencana Volume Rincian Output BNNP Riau Tahun 2022 ..... **14**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Riau Tahun 2022 memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta rencana sumber pembiayaannya. Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Riau merupakan hasil sinkronisasi dengan Rencana strategis BNN tahun 2020-2024 yang memiliki nilai strategis dalam memperkuat kapasitas dan infrastruktur BNN untuk menghadapi dinamika ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Rencana Kinerja Tahunan ini adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BNN Provinsi Riau sebagai unsur penunjang BNN RI dalam penyelenggaraan upaya P4GN di Provinsi Riau.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan menjadi landasan terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang disertai penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Rencana Kinerja ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sehingga akan terjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan organisasi. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi RIAU Tahun 2022 ini disusun. Kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Rencana Kinerja Tahunan ini sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan RKT ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, 7 Januari 2022

Kepala Badan Narkotika Nasional

Provinsi Riau

Robinson D.P. Siregar, S.H., S.I.K

BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Narkoba merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional termasuk didalamnya ketahanan daerah. Hal ini dikarenakan daya rusak narkoba yang sangat kompleks dimana berdampak buruk terhadap kesehatan pengguna, kehidupan sosial kemasyarakatan, meningkatkan tindak kriminalitas, menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan berujung pada penurunan kualitas dan daya saing bangsa.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang meningkat di tahun 2019, dimana pada tahun 2017 berhasil ditekan. Indonesia saat ini juga menjadi pasar terbesar penjualan dan peredaran narkoba di Asia. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis berupa negara kepulauan dimana jalur laut sering dimanfaatkan untuk penyelundupan narkoba, jumlah penduduk yang banyak, harga narkoba yang mahal di Indonesia dibandingkan negara lain, dan tingkat permintaan yang terus meningkat.

Provinsi Riau merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki kondisi geografis yang strategis untuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Apalagi didukung dengan sektor pariwisata yang terus berkembang dan penduduk yang didominasi oleh usia kerja. Faktor tersebut mendorong peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Riau terus meningkat seiring peningkatan kasus narkoba secara nasional. Kondisi tersebut juga mendorong tingginya angka kriminalitas di Riau.

Penanganan narkoba di Indonesia khususnya di Provinsi Riau perlu terus ditingkatkan mengingat dampak buruk narkoba bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jumlah kasus narkoba harus terus ditekan. Perang Terhadap Narkoba harus terus dilakuan demi mewujudkan Riau yang bebas dari narkoba serta meningkatkan ketahanan daerah Provinsi Riau. Kajian ini

akan membahas tentang bagaimana upaya meningkatkan kualitas P4GN di Provinsi Riau sebagai bentuk perang melawan narkoba yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan kajian gambaran penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Riau, upaya P4GN yang telah dilakukan dan bentuk optimalisasi P4GN yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas P4GN di Provinsi Riau.

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Provinsi Riau, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi Riau adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

a. Problematika pengawasan peredaran.

Lebih lanjut, isu strategis problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut:

1) Lemahnya pengawasan kejahatan narkoba di lembaga pemasyarakatan.
2) Lemahnya pengawasan peredaran gelap narkoba pada jalur tidak resmi.
3) Banyaknya jalur lintas batas tidak resmi sebagai pintu keluar masuk antar pulau.
4) Keterbatasan kewenangan BNN Provinsi Riau di wilayah perbatasan.

b. Rendahnya daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Problematika pengawasan peredaran diperparah oleh rendahnya daya dukung eksternal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang antara lain:

1) Lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana narkoba.
2) Daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun risiko hukum yang sangat tinggi.
3) Kurang dimanfaatkannya nilai dan budaya masyarakat lokal untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba.

4) Sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sekitar dan atau keluarganya karena adanya perasaan malu dan takut.

5) Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan dukungan sumber daya anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

c. Belum optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan.

Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1) Masih banyak pecandu narkoba yang relaps setelah menjalani program rehabilitasi dan kembali menggunakan narkoba. Bahkan terjadi peralihan penggunaan jenis narkoba dari satu jenis ke jenis narkoba lainnya oleh kalangan pecandu narkoba.

2) Sebaran dan ketersediaan lembaga rehabilitasi yang masih belum merata di seluruh wilayah provinsi Riau, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan assessment penyalah guna narkoba di wilayah yang tidak tersedia lembaga rehabilitasi.

3) Kesepahaman kalangan aparat penegak hukum dalam penerapan hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna dan atau pecandu narkoba yang masih rendah sehingga upaya penyelamatan penyalah guna dan atau pecandu narkoba melalui rehabilitasi belum maksimal.

2. Hasil Evaluasi

Permasalahan narkoba di Provinsi Riau harus ditangani secara serius, mengingat kondisi geografis dan demografis Provinsi Riau yang mendukung serta peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Riau dan Indonesia yang terus meningkat. Sasaran pembangunan nasional dalam penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi dengan indikator penurunan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba.

BNN Provinsi Riau menindaklanjuti sasaran pembangunan tersebut melalui beberapa upaya sebagai berikut :

a. Pencegahan

Kegiatan pencegahan dilakukan dengan tujuan untuk menekan sisi membangun kemampuan dan ketahanan diri masyarakat dari pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kegiatan ini dilakukan melalui :

- Mengembangkan sistem pertahanan diri (imunitas) masyarakat secara intensif melalui upaya promotif dan pengembangan kecakapan hidup sejak usia dini.
- Mengembangkan sistem deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, pendidikan, kerja, dan masyarakat.
- Mengoptimalisasi peran serta instansi pemerintah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan (agama, wanita, pemuda, profesi, dll) dalam kampanye masif anti narkoba.
- Mengembangkan pemberdayaan alternatif di daerah rawan peredaran gelap narkoba

b. Pemberantasan

Kegiatan pemberantasan ditujukan untuk pengungkapan dan penindakan sindikat kejahatan narkoba dengan menghukum berat dan menyita aset hasil kejahatan narkoba. Kegiatan ini dilakukan melalui :

- Memperkuat sistem interdiksi di wilayah jalur-jalur masuk (pelabuhan laut, bandara, dan lintas batas darat).
- Mengungkap jaringan tindak kejahatan narkoba hingga tuntas dan tegas.
- Menyita aset sindikat narkoba yang berasal dari tindak kejahatan narkoba.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas instansi dan lintas negara dalam rangka pengungkapan sindikat tindak kejahatan narkoba.

Upaya pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan tersebut dilakukan dalam rangka menyeimbangkan penekanan baik sisi *demand* ataupun *supply*. Pada tataran implementasi, kegiatan pencegahan dan pemberantasan tersebut dapat dioptimalkan melalui beberapa strategi berikut :

- **Mendorong semua Kabupaten / Kota di Provinsi RIAU untuk menyusun Perda P4GN di daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika mengamanatkan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten / Kota untuk menyusun penyusunan peraturan daerah mengenai P4GN. Pada tahun 2020 tepatnya 23 Desember 2020, Pemerintah Provinsi RIAU telah mengundangkan Pergub No 78 Tahun 2020 tentang fasilitasi P4GN. BNNP RIAU bersama- sama dengan Pemerintah Provinsi perlu mendorong semua Kabupaten/ Kota untuk menyusun Perda P4GN agar P4GN di daerah dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Dengan adanya Perda P4GN di daerah diharapkan dapat mendorong :

1) Penyusunan Rencana Aksi P4GN di daerah
2) Pembentukan tim terpadu P4GN di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Sampai dengan saat ini masih banyak Kabupaten / Kota di Provinsi RIAU yang belum menindaklanjuti Permendagri Nomor 12 Tahun 2019. Beberapa daerah masih dalam tahapan penyusunan Perda. Misi Provinsi RIAU keenam yaitu “RIAU Berkah dan Aman” melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah merupakan peluang untuk mendorong optimalisasi P4GN di daerah.

- **Penguatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah memiliki tupoksi penyelenggaraan P4GN di daerah yang berfokus pada upaya pencegahan. Tupoksi ini dijalankan oleh Kantor/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk itu BNNP RIAU

perlu meningkatkan kerjasama dengan Kantor/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah untuk bersama-sama menekan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di RIAU.

- **Meningkatkan alternatif pendanaan dari swasta dan masyarakat**

Kampanye anti narkoba bisa disinergikan dengan berbagai kegiatan swasta, baik melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan maupun kampanye perusahaan tersebut untuk meningkatkan *brand awareness* perusahaan, seperti yang sudah mulai banyak dilakukan oleh sejumlah perusahaan.

Berbagai model alternatif pendanaan kampanye anti narkoba dengan menggunakan pendanaan dari swasta dan masyarakat masih perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan baik dengan berbagai komponen swasta yang lain, maupun dengan berbagai variasi model kampanyenya mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah.

- **Mendorong pembentukan rumah edukasi anti narkoba di setiap kota/kabupaten**

Sebagai bagian dari kampanye gerakan anti narkoba, BNN akan mendorong pembangunan rumah edukasi anti narkoba di setiap Kabupaten/Kota dengan menggandeng Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Rumah edukasi gerakan anti Narkoba dapat dipergunakan masyarakat dalam memperoleh informasi yang lengkap mengenai bahaya Narkoba baik tubuh, keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, masyarakat dapat menyelenggarakan aktivitas-aktivitas positif yang inspiratif, pengembangan potensi dan kemampuan, dan menjadi pusat pendidikan karakter.

- **Mendorong pembentukan desa bersinar**

Pembentukan desa bersinar merupakan salah satu amanat dari Inpres No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN dan PN Tahun 2020 – 2024. Pemerintah Provinsi Riau dalam RPJMD tahun 2019 - 2023 merencanakan pembentukan desa bersinar sebanyak 10 desa setiap tahunnya. BNN bersama dengan Pemerintah Provinsi perlu mendorong terwujudnya desa bersinar tersebut dan diprioritaskan pada daerah rawan dan rentan narkoba di Provinsi Riau. Selanjutnya BNNP RIAU dan

Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota perlu mendorong desa/kelurahan di Provinsi Riau untuk mengalokasi anggaran P4GN dalam APBDes- nya serta meningkatkan pendampingan pembentukan desa bersinar. Provinsi Riau memiliki 1.146 desa/kelurahan.

- **Inovasi dalam kampanye / sosialiasi anti narkoba**

  Kampanye / sosialisasi anti narkoba perlu terus dilakukan inovasi seperti dengan penggunaan media sosial, vlog, lomba poster anti narkoba, cerdas cermat anti narkoba, cipta lagu anti narkoba lomba pembuatan film pendek atau vlog. Inovasi dapat diarahkan kepada pendekatan TIK mengingat jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat.

- **Penguatan peran serta masyarakat**

  Salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan masalah narkoba adalah masih rendahnya peran serta masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat adalah melalui pemberdayaan masyarakat, dalam bentuk :

1) Pembinaan teknis Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba.
2) Bimbingan teknis Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba.
3) Pengidentifikasian dan pengembangan potensi sumber daya stakeholder dan masyarakat dalam rangka mendukung P4GN.
4) Peningkatan kuantitas dan kualitas penggiat dan relawan anti narkoba.
5) Fasilitasi dan dukungan pembinaan masyarakat anti Narkoba.

Siklus selanjutnya dalam penanganan permasalahan narkoba adalah rehabilitasi penyalah guna dan atau korban penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam hal ini BNN Provinsi Riau mendapatkan mandat khusus untuk melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi disamping juga dapat menyelenggarakan layanan rehabilitasi itu sendiri.

BNN Provinsi Riau berupaya melakukan penguatan kepada lembaga rehabilitasi baik pemerintah maupun komponen masyarakat dengan

berbagai pendekatan. Diantaranya upaya pemetaan, monitoring dan evaluasi perkembangan lembaga rehabilitasi. Bimbingan teknis dan pelatihan tenaga rehabilitasi juga terus dilakukan guna meningkatkan kualitas peyanan lembaga rehabilitasi kepada masyarakat.

Meskipun secara kuantitatif upaya penguatan lembaga rehabilitasi telah meningkat namun dari sudut pandang kinerja kelembagaan menunjukan bahwa upaya penguatan lembaga rehabilitasi masih belum optimal dan perlu ditingkatkan.

Capaian kinerja BNN Provinsi Riau secara keseluruhan atas arah kebijakan dan srategi dalam Renstra BNN RI Tahun 2015-2019 menunjukkan hasil yang baik. Begitu pula aspirasi masyarakat yang ditunjukkan dalam hasil survei atas pelayanan BNN Provinsi Riau kepada stakeholders menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, walaupun ada beberapa hal yang diharapkan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BNN PROVINSI RIAU
TAHUN 2022

Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menetapkan rencana kinerja Tahun 2022 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2022. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Riau Tahun 2022 sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	3 Kabupaten /Kota	341.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	4 Kabupaten /Kota	509.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi	4 Kabupaten /Kota	1.029.700.000
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”	1 Kawasan	192.526.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	2,5	
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	25 Orang	255.240.000
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang	
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	5 Lembaga	666.005.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	5 Unit	
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	3,27	
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	1 Peta Jaringan	175.000.000
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	12 Berkas	1.200.000.000
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	439.300.000
			Nilai tingkat keamanan barang	100	

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
			bukti narkotika dan non narkotika		
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	1 Berkas	210.000.000
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	89	181.842.000
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	4 BNN Kabupaten /Kota	
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	95	4.320.218.000
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 BNN Kabupaten /Kota	

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi*

BAB III
PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Riau Tahun 2022 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Riau tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Provinsi dan jajarannya selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah provinsi Riau, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau
Tahun 2022

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan *Soft Skill*	1 Lembaga
			Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	-
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5 Keluarga
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	2 Desa
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	1 Kelompok Masyarakat
			Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	-

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	5 Orang
			Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	10 Orang
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	25 Orang
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	Lembaga rehabilitasi yang operasional	5 Lembaga
			Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	4 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	1 Lembaga
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	1 Kelompok Masy
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	3 Laporan Informasi

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	12 Berkas Perkara
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika	2 Produk
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidanan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	20 Orang
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	1 Berkas Perkara
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Laporan
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Manajemen Keuangan	12 Layanan
			Layanan Perkantoran	12 Layanan

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN (RPKAT)

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2022

A. INFORMASI KINERJA KEGIATAN

1. Kinerja Kegiatan

Kode	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
3236	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Terselenggaranya fungsi administrasi keuangan yang sesuai prosedur	- Layanan Perkantoran - Layanan Manajemen Keuangan	12 Bulan 1 layanan
3237	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Terselenggaranya pengelolaan SDM dan organisasi yang efektif	- Layanan Manajemen Sumber Daya Manusi	40 Orang
3238	PenyusunandanPengembanganRencana Program danAnggaran BNN	Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	- Layanan perencanaan dan penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 dokumen 1 Dokumen
3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sara dan Prasarana	Terselenggaranya fungsi pelayanan umum yang maksimal	- Layanan Umum - Layanan Perkantoran - Layanan Sarana Internal	1 Layanan 12 bulan 11 Unit
3979	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Terselenggaranya Fungsi Kehumasan dan Keprotokolan yang maksimal	- Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan
3247	PenyelenggaraanAdvokasi	Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika	- Indek ketahanan keluarga terhadap faktor Resiko	5 Keluarga
3248	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningatnya daya tangkal mayarakat terhadap pengaruh buruk penyalahguna dan perdaran gelap Narkotika	- Jumlah Kelompok masyarakat kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yg difasilitasi Program Alternatif Development	1 Kelompok Masyarakat
5936	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya SMP dan SMU sederajat yang memperoleh Pengembangan Soft Skill	- Indeks Ketahanan Diri anak dan Remaja	1 Lembaga

3251	Pelaksanaan Intelegen Berbasis Teknologi	Meningkatnya Pengungkapan Jaringan	- Jumlah Jaringan Sindikat tindak pidana Narkotika dan Narkotika Prekusor yang diungkap	3 Laporan
3256	Pascarehabilitasi Penyalahguna dan atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	- Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Narkoba	1 Laporan
3257	Pemberdayaan Peranserta Masyarakat	Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengauh burk penyalahgunaan dan peredaran glap narkotika	- Jumlah Kabupaten/Kota yang di Advokasi kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	4 Kab/Kota
3258	Pengawasan Tahanaan Dan Barang Bukti	Meningatnya produk dan layanan Hukum serta kerjasama Nasional dan Internasional bidang P4GN	- Jumlah layanan Assesmen terpadu pelaku Tnda Pidana Narkotika - Jumlah layanan Pengawasan dan pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkoika - JUmlah layanan dan pengawasan & perawatan tahanan Tindak pidana narotika, prekusor Narkotika dan TPPU	40 Orang 2 Produk 20 Orang
3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas SDM Bidang Rehabilitasi	- Jumlah Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat yang Terlatih - Jumlah Petugas Rehabilitasi yang Tersertifikasi Teknis	5 orang 25 Orang
3260	PenguatanLembagaRehabilitasiKomponenMasyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	- Jumlah Lembaga Rehabilitasi Narkotika yang memenuhi - Jumlah unit penyelenggara layanan Rehab Intervensi - Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi di BNNK	5 lembaga 1 lembaga 4 Lembaga
5354	PenyidikanJaringanPeredaranGelapNarkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana Narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	- Jumlah perkara tindak pidana narkotika yang P21	12 Berkas perkara

2. Output Kegiatan

Kode	Kegiatan	Anggaran	Output/Sub Output	Volume Output
3236	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	3.739.129.000,-	Layanan Perkantoran	12 Bulan
			Layanan Manajemen Kinerja Internal	1 Dokumen
3237	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	31.250.000,-	Layanan Manajemen SDM	40 orang
3238	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program danAnggaran BNN	68.210.000,-	Layanan Perencanaan dan pengganggaran	1 Dokumen
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
3239	Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, RumahTangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	2.715.677.000,-	Layanan Umum	1 Layanan
			Layanan Perkantoran	12 Bulan
			Layanan Sarana Internal	11 Unit
3979	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	51.950.000,-	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan
3247	Penyelenggaraan Advokasi	91.000.000,-	Pendampingan prog. Ketahanan keluarga Anti Narkoba	5 keluarga

			Advokasi prog. Ketahanan keluarga berbasis Sumber daya desa	2 desa
3248	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	192.526.000,-	Fasilitas Prog. Aternativ Developmentpada Kelompok Masy di Kawasan RAwan	1 kelompok masyarakat
5936	Penegelolaan Informasi dan Edukasi	200.000.000,-	SMP dan SMU sederajat yang memperoleh pengembangan Soft Skill	1 lembaga
3251	Pelaksanaan Intelejen Berbasis Tehnologi	175.000.000,-	Laporan Informasi Intelejen Tindak Pidana Peredaraan Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika	3 Laporan
3256	Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	52.200.000,-	Data dan kajian klien Rehabilitasi	1 Laporan
3257	Pemberdayaan Peranserta Masyarakat	252.500.000,-	Advokasi kebijakan Kab/ Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga
3258	Pengawasan tahanan dan Barang Bukti	339.400.000,-	Layanan Assesmen terpadu tindak pidana nakotka	65 orang
			Layanan Pengawasan dan pngelolahan barang bukti narkotika dan Non Narkotika	2 Produk
			Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tidak pidana narkotika,	10 orang

			prekusor narkotika dan TPPU	
3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	207.185.000,-	Petugas pelaksanaan IBM yang diberikan pelatihan	5 orang
			Tenaga Rehabilitasi yang diberikan peningkatan Kompetensi teknis	25 orang
3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	280.630.000,-	Layanan Rehabilitasi di BNNP	70 orang
			Layanan IBM	20 orang
			Layanan SHKPN	800 orang
			Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	5 lembaga
			Fasilitas Lembaga Rehabiltasi di BNNKAB/Kota	4 lembaga
			Unit IBM yang terbentuk	2 lembaga
5354	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	879.200.000,-	Berkas PerkaraTindak Pidana Narkotika	12 berkas
5355	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	210.000.000,-	Berkas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang hasil tindak pidana narkotika	1 Berkas

B. RENCANA DAN JADWAL KEGIATAN

Output / Sub Output	Komponen/Sub Komponen	Anggaran	Frekuensi	Jadwal Bulan Pelaksanaan Kegiatan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Layanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.572.645.000,-	12 Bulan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	150.660.000,-	12 Bulan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Layanan Manajemen keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	15.824.000,-	4 kali		VV					VV					
LayananManajemen SDM	Administrasi Kepegawaian	5.580.000,-	3 kali			V			V			V			
	Pembinaaan Kepegawaian	3.750.000,-	1 kali					V							V
	Pelayanan Kesehatan Pegawai	21.920.000,-	12 kali	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan Kinerja Unit vertikal	13.498.000,-	1 kali				V								
	Penganggaran Unit Vertikal	14.958.000,-	4 kali				V					VV			V
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan pelaporan kinerja unit vertikal	39.754.000,-	6 kali				VV				VV				VV
Layanan Umum	Pelaksanaan Urusan umum	397.272.000,-	20 kali	V	VV	VV	VV	VV	VV	VV	VV	V	VV	V	V
Layanan perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.227.131.000,-	12 bulan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
LAyanan Sarana Internal	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	75.924.000,-	6 unit		V										
	Pengadaaan fasilitas kantor	15.350.000,-	5 unit		V										
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanana Hubungan Masyarakat dan Informasi	51.950.000,-	33 kali	VV	VVV	VVV	VVV	VVV	VVV	VVV	VVV	VVV	VVV	VV	VV

Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	PelaksanaanProgram Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	40.000.000,-	6 kali		VV	V	V	V	V						
Fasilitasi dan pembinan Pemerintah Desa	Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desar	51.000.000,-	6 kali			V	V	VV	V					V	
Fasilitas Program Alternatif Development pada kelompok masyarakat di kawasan rawan peredaran dan Penyalagnna Narkotika	Pemetaan kawasan rawan Narkoba	75.178.000,-	3 kali				VVV								
	Pengembangan Kapasitas padakawasan rawan Narkoba	106.006.000,-	2 kali					V	V						
	Monev Pelaksanaan Pogram Damas	11.342.000,-	1 kali										V		
Laporan Informasi Intelejen Tindak Pidana Peredaran Gelab Narkotika dan Prekusor Narkotika	Pengumpulan Informasi Intelejen	175.000.000,-	3 Laporan				V			V				V	
Pemetaan dan Evaluasi serta pelaporan	Pengelolaan Data	16.672.000,-	20 kali						V						V
	Evaluasi Pelaporan data	35.528.000,-	2 kali											VV	
Advokasi kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Pembinaan Tehnis	10.234.000,-	2 kali			V	V								
	Pemetaan kelompok sasaran di Instansi Pemerintah	58.712.000,-	1 kali		V										
	Pengembangan Kapasitas dan pembinaan masy	48.735.000,-	8 kali		VV			VV			VV			VV	

	melalui kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Ins Pemeintah														
	Monev kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Ins Pemerintah	4.850.000,-	10 kali											V	
	Pengembangan Kapasitas dan pembinaan masy melalui kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingk. Swasta	46.609.000,-	5 kali					VVV	VV						
	Monev kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingk Swasta	4.850.000,-	10 kali											V	
	Pengembangan Kapasitas dan pembinaan masy melalui kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingk. Masyarakat	24.801.000,-	1 kali					V							
	Monev kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingk Masyarakat	4.850.000,-	10 kali											V	
	Pengembangan kapasitas dan peminaan Masy melalui Kebiajakn Kota tanggap Ancaman Narkoba di Lingk. Pendidikn	44.009.000,-	2 kali				V		V						

	Monev kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingk Pendidikan	4.850.000,-	10 kali										V		
Layanan Assesmen Terpadu pelaku Tindak pidana Narkotika	Pelaksanaan Assesmen Terpadu	98.700.000,-	40. orang	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Layanan pengawasan dan Pengelolaan Barang buti Narotika dan Non Narkotika	Pengawasan dan perawatan Pengawasan dan pengelolaahan barang bukti	45.490.000,-	2 Produk (12 Bulan Layanan)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Layanan pengawasan dan perawatan tahanan Tindak pidana Narkotika, Preksor Narkotika dan TPPU	Pegawasan dan Perawatan tahanan Tidak pidana Narkotika	195.210.000,-	12 bulan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Petugas pelaksanaan IBM yang dibrikn pelatihan	Pelatihan petugas IBM	14.230.000,-	10 orang			V									
	Monitoring Rencana Aksi Petugas Rehab & Petugas AP	4.480.000,-	2 lembaga				V	V							
Tenaga rehabilitasi yang diberikan peningkatan kompetensi teknis	Peningkatan kompetensi tehnis petugas rehabilitasi	188.475.000,-	25 orang			V									
	Sertifikasi petugas rehabilitasi	57.314.000,-	15 orang										V		
Pelayanann Publik kepada Masyarakat	Operasional Fasilitasi Rehab di BNNP	24.555.000,-	12 Bulan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Layanan Rawat Jalan	40.820.000,-	55 Org	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Layanan Pendampingan dan Pemulihan	16.120.000,-	20 Org		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

	Layanan IBM	16.120.000,-	10 oang		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	Layanan SHKPN	69.600.000,-	300 orang	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	Lembaga Rehab yang operasional	27.220.000,-	5 Lembaga		V				V				V		
	FAsilitasi lembaga Rehabilitasi di BNN Kab/Kota	55.540.000,-	4 lembaga			V									
	Unit IBM yang terbentuk	34.825.000,-	2 lembaga	V	V				V	V	V				
Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika	879.000.000,-	12 perkara		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
Berkas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang hasil Tindak Pidana narkotika	Penyelidikan dan Penyidikan TPPU	210.000.000,-	1 Perkara										V		
SPM dan SMU Sederajat yang memperoleh pengembangan Soft Skill	Pelatihan pengembangan softskil di SMP dan SMU sederajat	31.048.000,-	3 kali				V	V	V						
	Penyebaran Informasi dan Edukasi	32.412.000,-	8 kali			V									
	Monitoring wilayah	11.540.000,-	3 kali						V			V	V		

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Riau

Robinson D.P. Siregar, S.H., S.IK